

Tata Kelola Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Untuk Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Pesisir Karangantu Kabupaten Serang

Ita Rosita Wahyiah¹, Diah Ayu Pratiwi², Eli Apud Saepudin³

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia^{1,2}

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia³

*Email Korespondensi: ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 08-08-2026

Disetujui 09-08-2026

Diterbitkan 12-08-2026

ABSTRACT

Developing a green economy in coastal areas requires governance capable of integrating environmental sustainability with enhanced community economic self-reliance. This study aims to analyze the governance of green economy development—leveraging fishery potential—to foster the self-reliance of the coastal community in Karangantu. A qualitative approach utilizing a case study method was employed. Data were gathered through in-depth interviews with ten informants—comprising local government officials, coastal community members, fishery business operators, and relevant stakeholders—and supplemented by observation and documentation. Data analysis involved reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that while the governance of green economy development in Karangantu is supported by government roles in facilitation, guidance, and service access, implementation remains not fully integrated. Key findings reveal that inter-actor collaboration lacks consistency and that limited community capacity remains a constraint on increasing the value-added of fishery products. Conversely, developing businesses based on local potential and improving market access present strategic opportunities to strengthen community economic self-reliance. The study contributes an integrative governance model linking government roles, inter-actor collaboration, the green economy, and coastal community capacity building.

Keywords: Governance; Policy Implementation; Green Economy; Coastal Communities; Self-Reliance.

ABSTRAK

Pengembangan ekonomi hijau di kawasan pesisir memerlukan tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pemerintahan dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi perikanan untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir Karangantu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat pesisir, pelaku usaha

perikanan, dan pemangku kepentingan terkait, serta diperkuat melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengembangan ekonomi hijau di Karangantu telah didukung oleh peran pemerintah dalam fasilitasi, pembinaan, dan penyediaan akses pelayanan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor belum berjalan secara konsisten dan penguatan kapasitas masyarakat masih menjadi faktor pembatas dalam peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Di sisi lain, pengembangan usaha berbasis potensi lokal dan peningkatan akses pasar menjadi peluang strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Penelitian ini menghasilkan kontribusi berupa model tata kelola integratif yang menghubungkan peran pemerintah, kolaborasi antaraktor, ekonomi hijau, dan penguatan kapasitas masyarakat pesisir.

Katakunci: Tata Kelola Pemerintahan; Implementasi Kebijakan; Ekonomi Hijau; Masyarakat Pesisir; Kemandirian.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi karena menjadi ruang interaksi antara aktivitas perikanan, perdagangan, permukiman, dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik dapat menimbulkan persoalan lingkungan, ketimpangan akses ekonomi, serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi pesisir tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan ekonomi hijau yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kebijakan, menyediakan fasilitas, memperkuat kapasitas masyarakat, serta menciptakan mekanisme kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Karangantu merupakan salah satu kawasan pesisir di Kota Serang yang memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. Aktivitas masyarakat di kawasan ini berkaitan erat dengan kegiatan perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Potensi tersebut memberikan peluang bagi pengembangan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil berbasis hasil perikanan. Namun demikian, potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian masyarakat. Masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan usaha, pengolahan hasil perikanan bernilai tambah, akses pasar, kapasitas pengelolaan usaha, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga mampu menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Permasalahan tersebut semakin relevan dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Ekonomi hijau menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Dalam pembangunan kawasan pesisir, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal,

peningkatan nilai tambah produk perikanan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan limbah, serta penguatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi hijau di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun tata kelola yang menghubungkan kebijakan lingkungan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Sejumlah penelitian empiris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, kapasitas masyarakat, akses terhadap pasar, dukungan pemerintah, serta keterlibatan berbagai aktor. Penelitian mengenai tata kelola pesisir menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat meningkatkan koordinasi antaraktor dan memperkuat pengelolaan sumber daya. Penelitian lain mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa penguatan kapasitas, akses ekonomi, dan pengembangan usaha lokal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kajian mengenai ekonomi hijau semakin menekankan pentingnya mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan aktivitas ekonomi lokal. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan pembangunan pesisir tidak dapat hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan aktor nonpemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih cenderung mengkaji aspek tata kelola kolaboratif, konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi secara parsial. Kajian mengenai collaborative governance lebih banyak menitikberatkan pada mekanisme hubungan antaraktor, sedangkan kajian pemberdayaan masyarakat lebih berfokus pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan. Di sisi lain, penelitian ekonomi hijau umumnya menekankan aspek keberlanjutan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap berupa belum optimalnya integrasi antara tata kelola pemerintahan, prinsip ekonomi hijau, dan kemandirian masyarakat dalam satu kerangka pengembangan ekonomi pesisir pada tingkat lokal. Gap tersebut menjadi semakin penting ketika diterapkan pada kawasan pesisir yang memiliki potensi ekonomi tinggi tetapi masih menghadapi keterbatasan kapasitas masyarakat dan tata kelola pengembangan usaha. Penelitian ini menggunakan perspektif Good Governance dan Collaborative Governance sebagai landasan untuk memahami bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, fasilitasi, transparansi, akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Good Governance memberikan kerangka mengenai prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif, sedangkan Collaborative Governance menjelaskan proses kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan aktor lainnya dalam menyelesaikan persoalan publik. Kedua perspektif tersebut kemudian dihubungkan dengan konsep ekonomi hijau yang menempatkan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Integrasi ketiga perspektif tersebut diarahkan pada tujuan yang lebih konkret, yaitu terbentuknya kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, peningkatan nilai tambah produk perikanan, perluasan akses pasar, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Atas dasar tersebut, novelty penelitian ini tidak hanya terletak pada penggabungan konsep Good Governance, Collaborative Governance, ekonomi hijau, dan kemandirian masyarakat, tetapi pada upaya merumuskan model tata kelola pengembangan ekonomi hijau masyarakat pesisir yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, masyarakat sebagai aktor utama pengembangan ekonomi lokal, serta pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra kolaboratif. Model tersebut menekankan keterhubungan antara tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha berbasis hasil perikanan, keberlanjutan lingkungan, dan perluasan akses pasar. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman empiris mengenai mekanisme

tata kelola yang dapat mendorong perubahan dari pemanfaatan sumber daya pesisir secara konvensional menuju aktivitas ekonomi yang lebih produktif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat kemandirian masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan penelitian diarahkan pada bagaimana tata kelola pemerintahan dalam pengembangan ekonomi hijau dilaksanakan di kawasan pesisir Karangantu, bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi perikanan, serta sejauh mana tata kelola tersebut mampu mendukung kemandirian masyarakat pesisir. Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan pembangunan ekonomi pesisir tidak hanya diukur dari peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh manfaat secara berkelanjutan serta memiliki kapasitas untuk mengembangkan usaha dan mengelola sumber daya lokal secara mandiri. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pemerintahan dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi perikanan untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir Karangantu. Penelitian ini secara khusus menganalisis peran pemerintah, mekanisme kolaborasi antaraktor, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan nilai tambah produk perikanan, serta aspek keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan model tata kelola yang lebih integratif dan kontekstual bagi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir yang produktif, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis tata kelola pemerintahan dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau guna mewujudkan kemandirian masyarakat pesisir Karangantu, Kabupaten Serang. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta dinamika tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lokasi penelitian berada di kawasan pesisir Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, yang merupakan salah satu sentra perikanan dan kawasan pesisir strategis. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi unsur Pemerintah Kota Serang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, pemerintah kelurahan, kelompok nelayan, pelaku UMKM pesisir, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi, dokumen perencanaan, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi hijau dan tata kelola pemerintahan. Penelitian dilaksanakan di Lokasi penelitian berada di kawasan pesisir Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten pada bulan Mei sampai dengan bulan juni 2026.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta berbagai referensi ilmiah untuk memperoleh data yang valid dan kredibel. Analisis penelitian difokuskan pada prinsip-prinsip good governance, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan dalam mendukung implementasi kebijakan ekonomi hijau dan mewujudkan kemandirian masyarakat pesisir Karangantu secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi hijau di kawasan pesisir Karangantu, Kabupaten Serang, telah mulai diintegrasikan ke dalam berbagai program pembangunan daerah yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Kawasan Karangantu memiliki posisi strategis sebagai sentra perikanan tangkap, kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), pusat perdagangan hasil laut, serta destinasi wisata bahari di Provinsi Banten. Potensi tersebut menjadi modal utama dalam pengembangan ekonomi hijau melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melaksanakan berbagai program, seperti pemberdayaan kelompok nelayan, pengembangan usaha mikro berbasis hasil perikanan, rehabilitasi ekosistem mangrove, pengelolaan sampah pesisir, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil laut. Program-program tersebut merupakan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau telah mengarah pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, kelompok nelayan, pelaku usaha mikro, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas lingkungan. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator melalui penyusunan kebijakan, penyediaan program pemberdayaan, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pembinaan masyarakat. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir melalui aktivitas penangkapan ikan, budidaya, pengolahan hasil laut, hingga pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat dan komitmen seluruh aktor pembangunan.

Ditinjau dari prinsip partisipasi, masyarakat pesisir Karangantu telah terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi lingkungan, seperti penanaman mangrove, aksi bersih pantai, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pelatihan diversifikasi produk perikanan. Keterlibatan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir sebagai sumber mata pencaharian jangka panjang. Namun demikian, tingkat partisipasi tersebut masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu yang telah memperoleh pendampingan dari pemerintah atau organisasi nonpemerintah, sedangkan sebagian nelayan tradisional masih memandang bahwa kegiatan konservasi belum memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi hijau memerlukan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif agar seluruh kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sama.

Dari aspek transparansi, pemerintah telah menyediakan berbagai informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah kelurahan, forum kelompok nelayan, penyuluhan lapangan, dan media informasi pemerintah daerah. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan ekonomi hijau belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat karena istilah dan konsep ekonomi hijau masih dianggap sebagai kebijakan yang bersifat umum dan belum dikaitkan secara langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan sosialisasi yang lebih sederhana dan aplikatif agar masyarakat memahami bahwa praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah hasil perikanan, penggunaan alat tangkap yang sesuai ketentuan, serta rehabilitasi mangrove merupakan bagian dari implementasi ekonomi hijau.

Pada aspek akuntabilitas, pelaksanaan program pembangunan pesisir telah mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan program kerja perangkat daerah, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, koordinasi antarlembaga masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan pelabuhan. Beberapa program pemberdayaan masyarakat masih berjalan secara sektoral sehingga belum menghasilkan sinergi yang optimal. Misalnya, program peningkatan produksi perikanan belum sepenuhnya diintegrasikan dengan program pengembangan industri pengolahan hasil laut, pemasaran digital, maupun pengembangan ekowisata yang sebenarnya dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

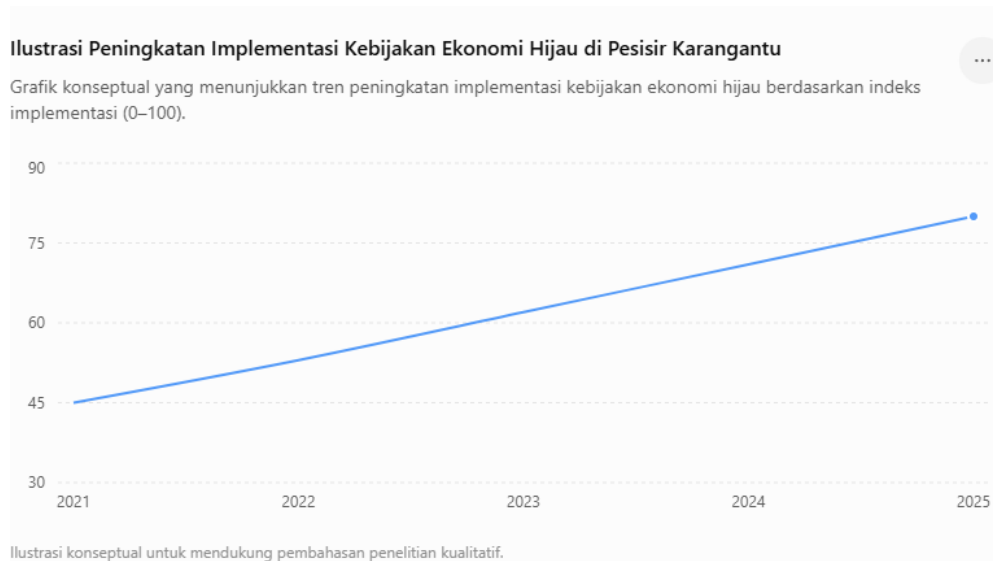
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi ekonomi hijau memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Kelompok usaha pengolahan hasil laut mulai mengembangkan berbagai produk bernilai tambah, seperti ikan asap, abon ikan, kerupuk ikan, terasi, dan produk olahan lainnya yang dipasarkan melalui platform digital maupun pasar lokal. Diversifikasi usaha tersebut mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hasil tangkapan laut yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim. Selain itu, keberadaan kawasan wisata religi dan wisata bahari di sekitar Karangantu membuka peluang berkembangnya usaha kuliner, penyewaan perahu wisata, perdagangan hasil laut, serta usaha mikro lainnya yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan ekonomi hijau masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan utama meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi ramah lingkungan, keterbatasan akses pembiayaan bagi usaha mikro pesisir, lemahnya inovasi produk berbasis hasil laut, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk. Selain itu, pencemaran pesisir akibat limbah domestik dan aktivitas pelabuhan masih menjadi persoalan yang memengaruhi kualitas lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan investasi, inovasi teknologi, penguatan kelembagaan masyarakat, dan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Apabila dianalisis menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), implementasi kebijakan ekonomi hijau di Karangantu menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah berlangsung melalui keterlibatan berbagai aktor dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, intensitas komunikasi, pembagian peran, dan keberlanjutan kerja sama masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Demikian pula jika ditinjau dari prinsip *Good Governance*, aspek partisipasi masyarakat telah berkembang dengan cukup baik, tetapi indikator efektivitas, koordinasi kelembagaan, dan integrasi kebijakan lintas sektor masih

memerlukan penguatan sehingga implementasi ekonomi hijau dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada bagian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di kawasan pesisir Karangantu telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ekonomi hijau masih memerlukan peningkatan dalam aspek koordinasi, penguatan kapasitas masyarakat, integrasi program lintas sektor, serta pengembangan inovasi ekonomi berbasis sumber daya pesisir agar tujuan mewujudkan kemandirian masyarakat pesisir dapat tercapai secara optimal.



Gambar. Ilustrasi Peningkatan Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau di Pesisir Karangantu

Grafik tersebut menunjukkan kecenderungan meningkatnya implementasi kebijakan ekonomi hijau di kawasan pesisir Karangantu. Peningkatan indeks menggambarkan semakin baiknya tata kelola pemerintahan melalui penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan partisipasi masyarakat, rehabilitasi lingkungan pesisir, pengembangan usaha perikanan berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam artikel ilmiah, grafik ini sebaiknya diberi keterangan sebagai ilustrasi konseptual. Apabila penelitian menggunakan data lapangan berupa skor kuesioner atau hasil penilaian indikator, nilai pada grafik dapat diganti dengan data empiris hasil penelitian.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau di kawasan pesisir Karangantu telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan ekonomi hijau diwujudkan melalui program pemberdayaan nelayan, pengembangan usaha mikro berbasis hasil perikanan, rehabilitasi ekosistem mangrove, pengelolaan lingkungan pesisir, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Kolaborasi antarpemangku kepentingan memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pemanfaatan sumber daya pesisir yang lebih berkelanjutan. Namun

demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya inovasi dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta terbatasnya akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha pesisir.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan melalui peningkatan sinergi antarinstansi, penguatan kelembagaan masyarakat pesisir, perluasan akses terhadap pembiayaan hijau (*green financing*), pengembangan inovasi produk perikanan berbasis ekonomi hijau, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan pengelolaan usaha. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kebijakan konservasi lingkungan pesisir yang diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan ekonomi hijau tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir Karangantu, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan kemandirian masyarakat pesisir secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. (2025). *Kabupaten Serang Dalam Angka 2025*. Serang: BPS Kabupaten Serang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Roadmap Ekonomi Hijau Indonesia 2025–2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. (2024). *Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2024*. Serang.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: KLHK.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Maulana, A., & Yulianti, D. (2022). Multi-Actor Collaboration in Improving the Economy of the Fishing Community in Karangantu Coastal Area of Serang, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 134–146.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- United Nations Environment Programme. (2023). *Green Economy Progress Measurement Framework*. Nairobi: UNEP.
- World Bank. (2022). *Blue Economy for Resilient Coastal Development*. Washington, DC: World Bank.

